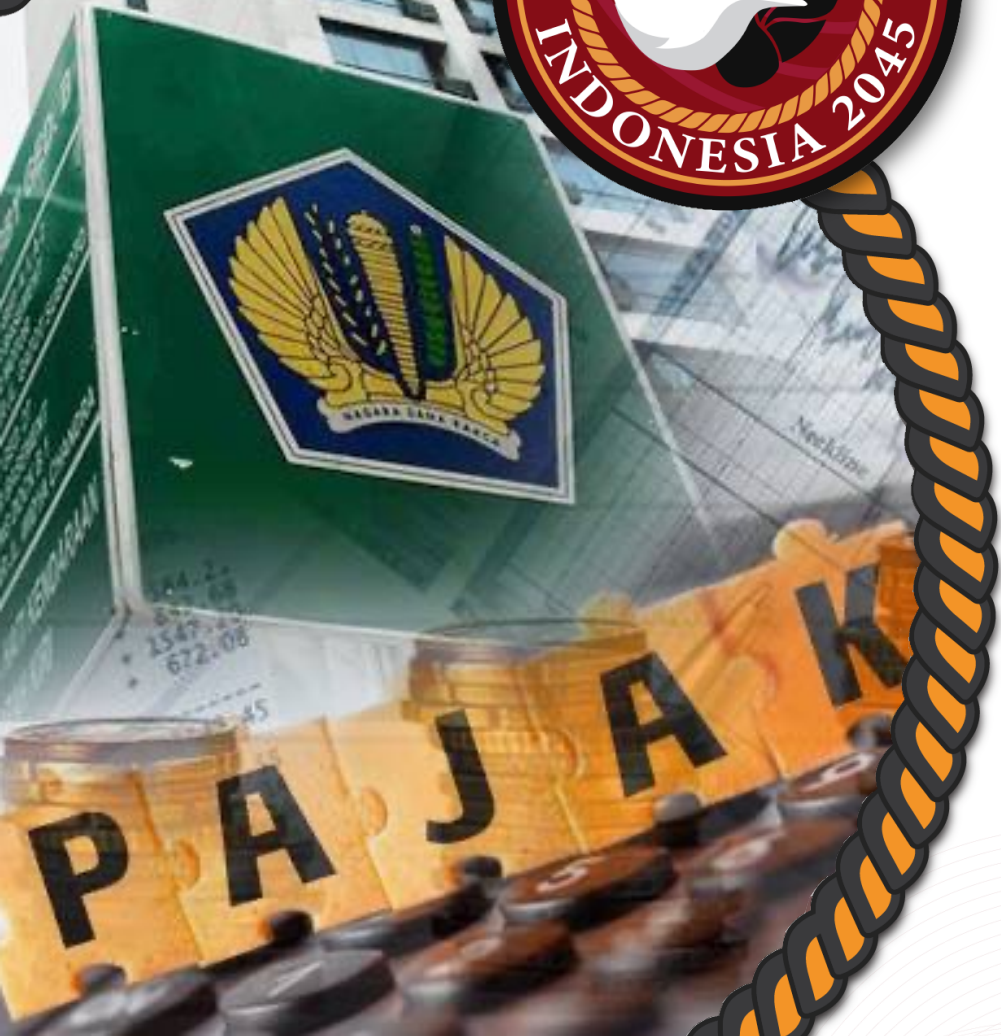




# Wacana Kenaikan PPN 12%

Rionanda Dhamma Putra  
Nadia Restu Utami  
Radhityana Muhammad

14 Desember 2024



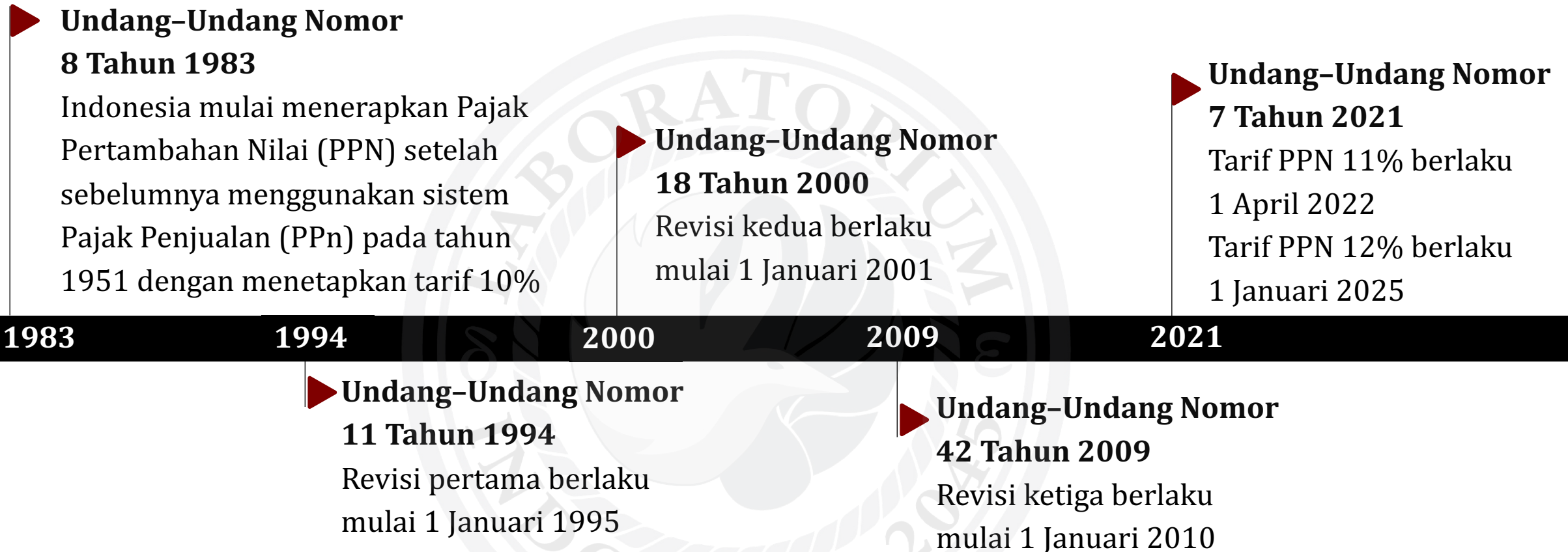
# Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Penerimaan Pajak**, pada tanggal 1 Januari 2025 **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan menjadi 12%** setelah sebelumnya naik menjadi 11% pada tahun 2022. Kajian ini menunjukkan bahwa **kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%** turut **menurunkan daya beli masyarakat** yang tercermin melalui tren penurunan tingkat inflasi inti yang disertai stagnasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR). Dengan demikian, kenaikan **PPN menjadi 12%** dinilai berpotensi **akan semakin melemahkan daya beli masyarakat** mengingat lapangan pekerjaan yang menyempit ditandai dengan gelombang PHK.

Selanjutnya, peningkatan **PPN menjadi 12%** diproyeksikan akan berkontribusi terhadap **peningkatan penerimaan sebesar Rp125 triliun**. Di sisi lain, program utama pemerintah saat ini yaitu **Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program 3 juta rumah** secara bersama **membutuhkan anggaran Rp124,6 triliun**. Bila PPN tetap 11% akan memberikan tugas tambahan bagi pemerintah untuk mencari alternatif pendapatan utamanya untuk membiayai berbagai program dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan.

Kemudian, temuan tim Politik Media Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) yang memantau percakapan di **media sosial mencatat** bahwa sekitar **93% narasi yang muncul terkait PPN 12% memiliki sentimen negatif**. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar percakapan yang muncul menolak kenaikan PPN 12%. Percakapan hingga lebih dari 90% setara dengan yang terjadi pada saat penolakan revisi UU Pilkada yang lalu.

# Lini Masa Kebijakan PPN



Kebijakan untuk mengubah **tarif PPN menjadi 11%** memerlukan waktu **39 tahun** lamanya, namun **menaikkan tarif PPN menjadi 12%** hanya memerlukan waktu **2 tahun**.

# UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Penerimaan Perpajakan

## Barang tidak terdampak tarif PPN



Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan yang dikonsumsi di tempat atau tidak termasuk makanan yang disajikan oleh usaha jasa boga/ katering



Uang, emas batangan yang digunakan untuk kepentingan devisa



Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, tepung, kedelai, garam, daging, telur, susu murni, buah-buahan, sayur-sayuran)

## Jasa tidak terdampak tarif PPN



Jasa keagamaan



Jasa perhotelan



Jasa kesenian dan hiburan



Jasa boga atau katering



Jasa penyediaan tempat parkir



Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

Meskipun pemerintah merevisi pengenaan PPN 12% hanya untuk barang mewah, namun rincian barang mewah yang akan terdampak oleh kenaikan PPN 12% akan tergantung pada keputusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

# Perbandingan yang Perlu Diperhatikan dalam RAPBN 2025

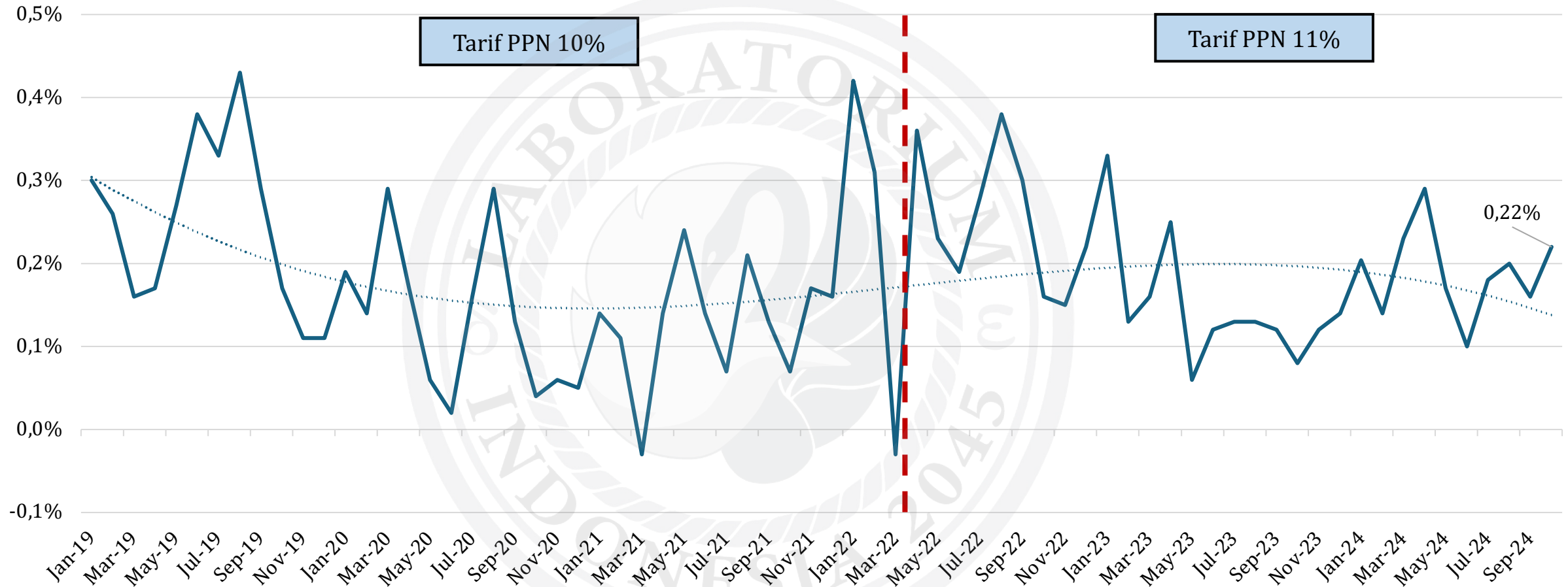
(dalam Triliun Rupiah)	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025	Perubahan (2024-2025)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1628,95	2006,33	2630,15	2766,75	2767,54	2996,29	8,27%
1. Penerimaan Perpajakan	1285,14	1547,84	2034,55	2154,21	2218,40	2490,91	12,28%
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1248,42	1474,15	1943,65	2089,72	2152,45	2433,51	13,06%
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	594,03	698,68	998,21	1061,23	1062,32	1209,28	13,83%
a) Pendapatan PPh Migas	33,03	643,84	77,84	68,77	61,90	62,84	1,52%
b) Pendapatan PPh Nonmigas	561,01	643,84	920,37	992,46	1000,42	1146,44	14,60%
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450,33	551,90	687,62	763,63	819,21	945,12	15,37%
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20,95	18,92	23,26	33,27	33,18	27,11	-18,29%
4) Pendapatan Cukai	176,31	195,52	226,88	221,85	230,50	244,20	5,94%
5) Pendapatan Pajak Lainnya	6,79	11,13	7,69	9,73	7,23	7,80	7,88%
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36,72	73,70	90,90	64,49	65,95	57,41	-12,95%
1) Pendapatan Bea Masuk	32,44	39,12	51,08	50,89	50,32	52,94	5,21%
2) Pendapatan Bea Keluar	4,28	34,57	39,82	13,60	15,64	4,47	-71,42%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343,81	458,49	595,59	612,54	549,14	505,38	-7,97%
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	97,23	149,49	268,77	254,20	235,52	217,96	-7,46%
1) Pendapatan SDA Migas	69,08	96,62	148,70	116,18	121,49	120,99	-0,41%
a) Pendapatan Minyak Bumi	44,87	65,00	11,99	887,41	89,25	89,03	-0,25%
b) Pendapatan Gas Bumi	24,21	31,62	36,71	28,77	32,24	31,96	-0,87%
2) Pendapatan SDA Nonmigas	28,14	52,87	120,07	138,02	114,03	96,97	-14,96%
a) Pendapatan Pertambangan dan Batu Bara	21,18	44,84	110,79	129,13	102,06	87,48	-14,29%
b) Pendapatan Kehutanan	4,40	5,40	5,80	5,43	6,00	5,67	-5,50%
c) Pendapatan Perikanan	0,60	0,71	1,19	0,64	3,50	1,63	-53,43%
d) Pendapatan Panas Bumi	1,96	1,93	2,29	2,83	2,48	2,19	-11,69%
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66,08	30,50	40,60	82,06	85,85	86,00	0,17%
c. PNBP Lainnya	111,20	152,50	196,32	180,42	147,34	123,49	-16,19%
d. Pendapatan BLU	69,31	126,00	89,90	95,86	80,43	77,93	-3,11%
II. PENERIMAAN HIBAH	18,83	5,01	5,70	17,18	34,92	0,58	-98,34%
PENDAPATAN NEGARA	1647,78	2011,35	2635,84	2783,93	2802,46	2996,87	6,94%

Berkaca pada RAPBN 2025, pendapatan negara yang berasal dari PPN dan PPnBM mengalami peningkatan yang paling besar bila dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya di Outlook APBN 2024 yaitu sebesar 15,37% atau sebesar Rp125 triliun.

Jika target penerimaan PPN tersebut disusun dengan asumsi PPN 12%, perhitungan dengan dasar asumsi PPN tetap pada level 11% akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp866 triliun. Dengan kata lain, kenaikan PPN menjadi 12% hanya memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp79 triliun.

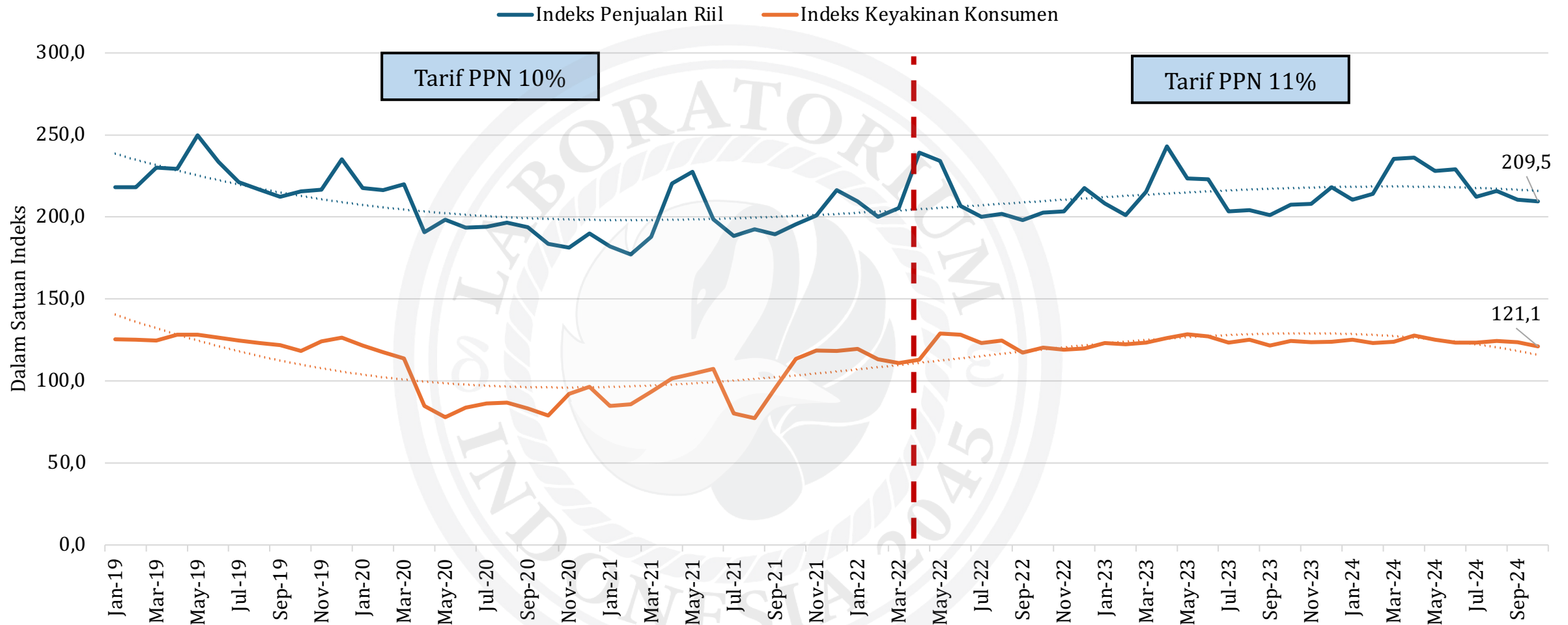
# Dampak Kenaikan PPN dari 10% ke 11%

Inflasi Inti Bulanan (Januari 2019-Oktober 2024)



Inflasi Inti (*core Inflation*) sebagai indikator daya beli masyarakat menunjukkan **tren menurun** pasca kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada 1 April 2022. Artinya, **kenaikan PPN yang diberlakukan turut berkontribusi pada kenaikan barang-barang konsumsi** yang lebih cepat dibandingkan dengan *disposable income* konsumen.

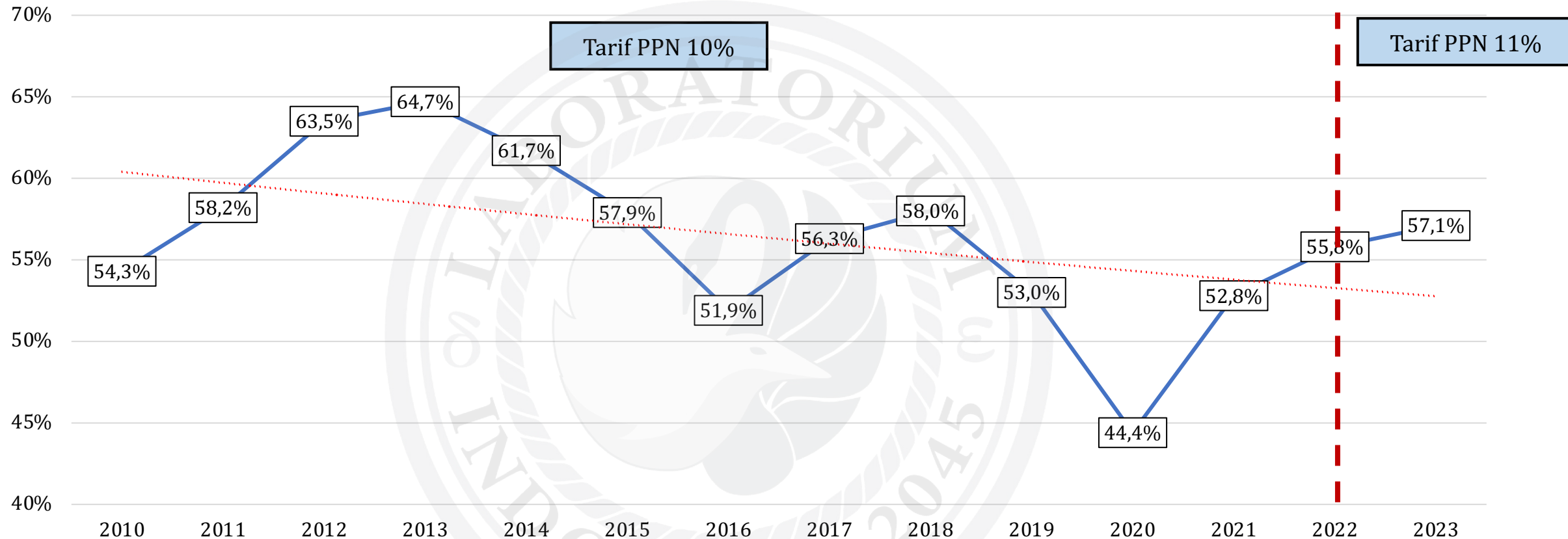
# Dampak Kenaikan PPN dari 10% ke 11%



Selanjutnya, daya beli masyarakat yang melemah juga disertai dengan **stagnasi pemulihan nilai Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)**. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap perekonomian belum pulih dari pascapandemi sehingga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

# Optimalisasi Penerimaan PPN

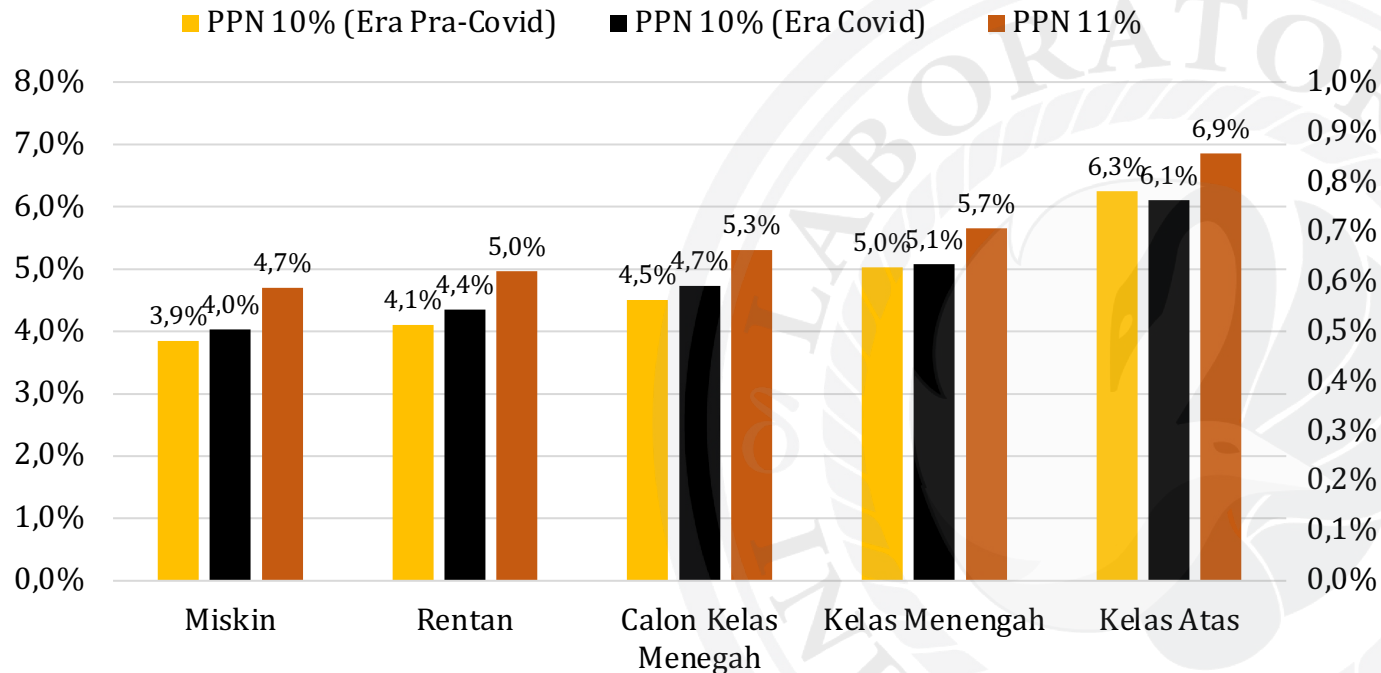
Rasio Penerimaan PPN (VAT Revenue Ratio)



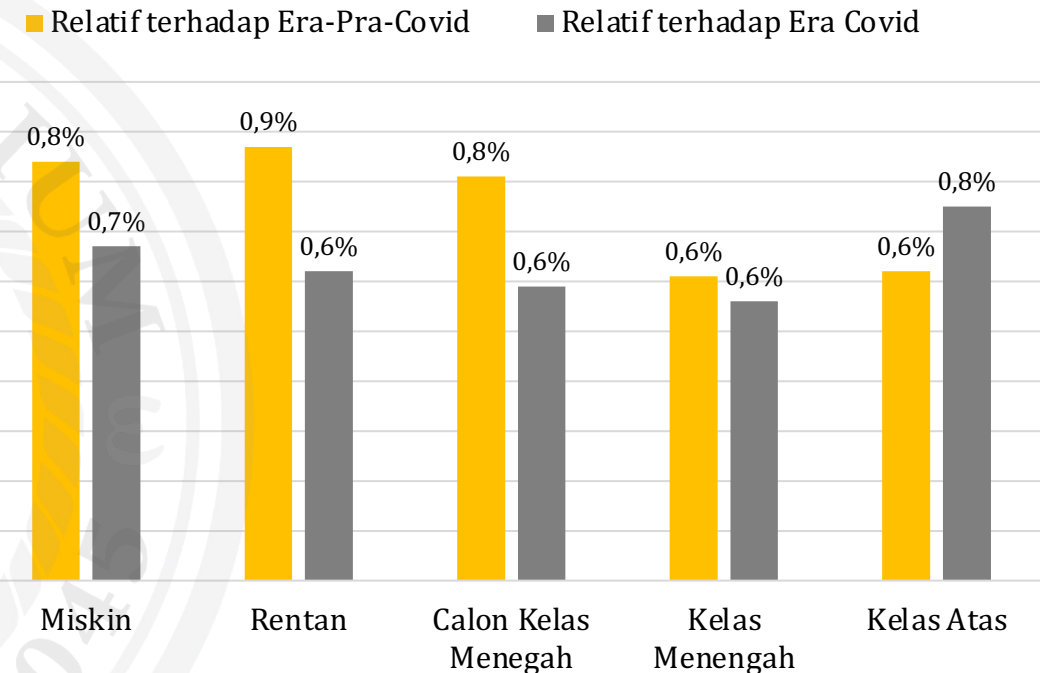
**VAT Revenue Ratio/VRR** merupakan instrumen untuk membandingkan realisasi penerimaan PPN yang seharusnya dihasilkan dalam kondisi ideal. Tercatat VRR Indonesia menunjukkan **tren menurun**. Setelah diberlakukan kenaikan tarif PPN tahun 2023, rasio penerimaan baru mencapai 57,1% yang mengindikasikan 42,9% dari potensi penerimaan PPN **belum terkumpul semestinya**. Meskipun mengalami kenaikan sejak diberlakukannya kebijakan kenaikan PPN, namun persentase penerimaan masih jauh lebih rendah dibandingkan dalam satu dekade lalu. **Informalitas sektor** menjadi hambatan terbesar rendahnya penerimaan PPN.

# Dampak Terhadap Masyarakat

Porsi Pengeluaran PPN (% Pengeluaran) Berdasarkan Kelompok Pendapatan



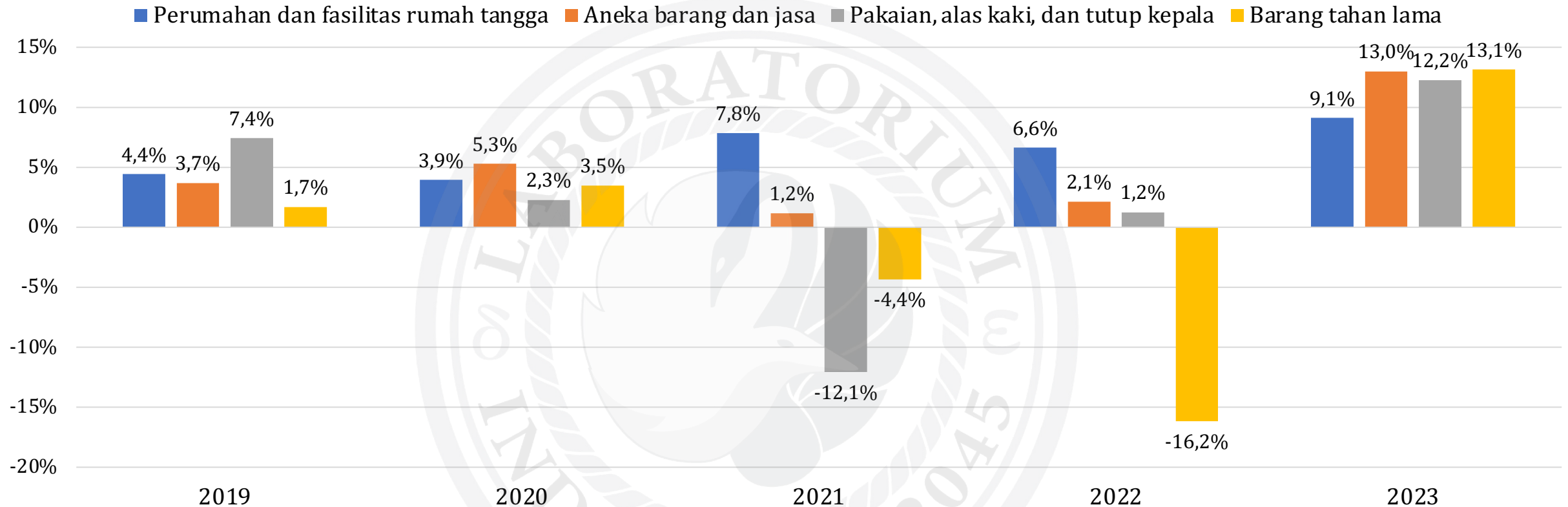
Perubahan Porsi Pengeluaran PPN (Poin Persentase) Berdasarkan Kelompok Pendapatan



Berdasarkan grafik porsi pengeluaran PPN terhadap total pengeluaran rumah tangga, terlihat jelas **terdapat sifat progresif pada beban pajak**. Kelompok termiskin memiliki porsi pengeluaran lebih rendah dibandingkan dengan kelompok terkaya. Akan tetapi, jika dilihat dari **perubahan selisih poin persentase** (Grafik kanan) **sifat regresif** terlihat jelas di mana kelompok miskin merasakan dampak kenaikan beban pajak lebih besar dibandingkan kelompok kelas atas. Hal ini dikarenakan, sebagian besar rumah tangga miskin menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi dibandingkan rumah tangga kaya. Dengan demikian, **kebijakan PPN** yang menyasar sisi konsumsi justru berpotensi paling **merugikan masyarakat kelompok termiskin**.

# Dampak Terhadap Pengeluaran Per Kapita

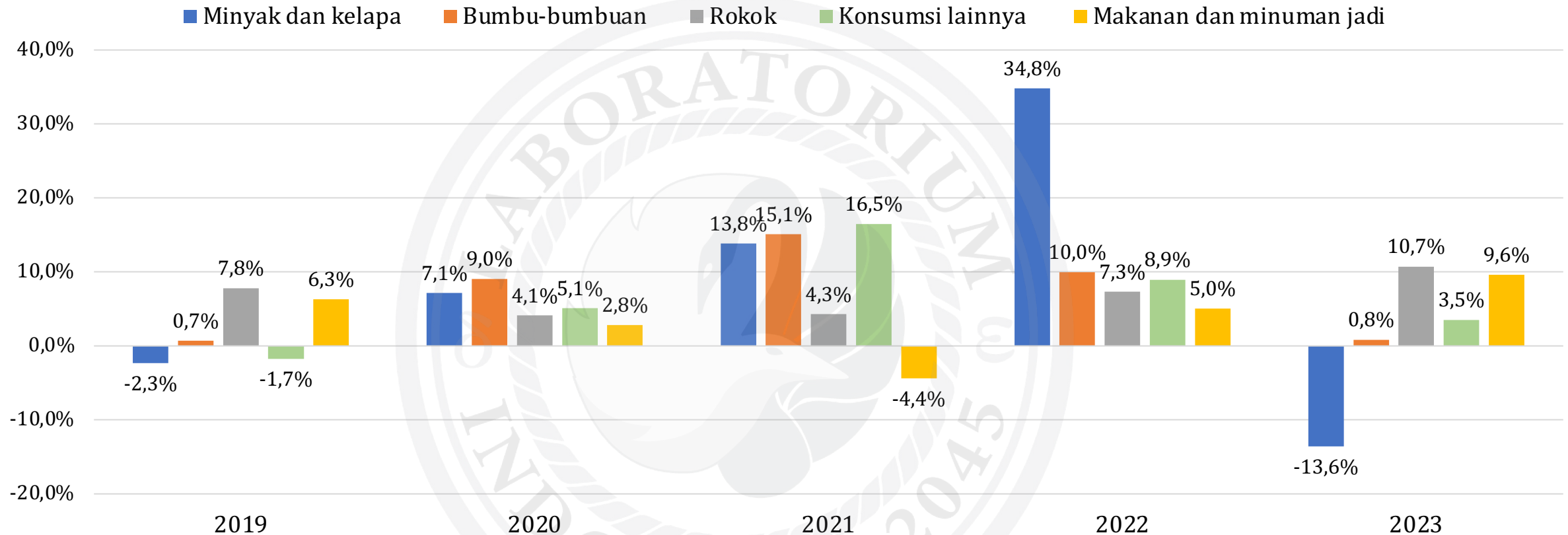
Pengeluaran Per Kapita Komoditas Bukan Makanan Kena Pajak (YoY)



Berdasarkan kelompok bukan makanan tahun 2023, **komoditas barang tahan lama, fashion, serta aneka barang dan jasa** (contoh: sabun mandi/cuci, kosmetik, *skincare/bodycare*, jasa supir, jasa PRT) cenderung **mengindikasikan** kenaikan akibat **revenge consumption** yang sebelumnya disebabkan karena penundaan konsumsi pascapandemi Covid-19. Di sisi lain pengeluaran **komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga** (contoh: tagihan utilitas dan biaya perbaikan rumah) **terus mengalami kenaikan** mengingat pengeluaran untuk komoditas ini akan terus dikeluarkan secara rutin.

# Dampak Terhadap Pengeluaran Per Kapita

## Pengeluaran Per Kapita Komoditas Makanan Kena Pajak



Berdasarkan kelompok makanan, **rokok** serta **makanan dan minuman jadi** (contoh: *snack*, roti, *soft drink*, sirup, air mineral, minuman beralkohol) adalah komoditas yang mengalami **kenaikan tertinggi** sebesar 10,7% dan 9,6% pada tahun 2023. Di sisi lain, proporsi pengeluaran kelompok konsumsi lainnya yang meliputi mie instan, bihun, makaroni, dan kerupuk mengalami peningkatan sebesar 3,5% meskipun peningkatannya lebih rendah dari tahun 2022. Sebaliknya, **komoditas minyak dan kelapa menunjukkan penurunan cukup tajam** mengingat pada tahun 2022 pengeluaran minyak mencapai Rp21.717 akibat kelangkaan dan terjadi penurunan menjadi Rp18.766 pada tahun 2023.

# Dampak Kerugian PPN 12% Bagi Penduduk Indonesia

- Rerata pengeluaran bulanan per kapita berdasarkan komoditas tahun 2023 = **Rp1.451.870**

- Proyeksi kerugian konsumsi rumah tangga tahun 2025 menurut INDEF (menggunakan model *computable general equilibrium*) = **-0.26%**

**Proyeksi rerata pengeluaran bulanan per kapita tahun 2025**

$$FV = \frac{\text{Rp}1.451.870}{(1+0,0026)} = \mathbf{\text{Rp}1.448.105}$$

- Selisih Perubahan 2023 – Outlook 2025

Rp1.448.105 - Rp1.451.870 = -Rp3.765 per kapita bulanan

- Kerugian seluruh penduduk Indonesia

Rp3.765 x 12 bulan x 284.438.780 (jiwa) = **Rp12,851 Triliun**

# Kesimpulan: *Cost and Benefit Analysis* Program Utama Pemerintah

Keterangan	PPN Tetap 11%	PPN 12%	Program MBG	Program 3 Juta Rumah
+ Pemerintah	Meredam kecemasan masyarakat	Peningkatan Pendapatan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi terhadap peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendongkrak pertumbuhan ekonomi</li> <li>Implementasi keadilan sosial melalui penyediaan hunian</li> </ul>
- Pemerintah	Potensi defisit anggaran	Penurunan kepercayaan masyarakat	Peningkatan pengeluaran pemerintah	Peningkatan pengeluaran pemerintah
+ Masyarakat	Daya beli masyarakat terjaga	Mengurangi ketergantungan terhadap utang LN	Menjamin kecukupan gizi anak sekolah dan ibu hamil/menyusui	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses hunian yang lebih luas untuk MBR</li> <li>Pertumbuhan sektor industri dasar dan ritel</li> </ul>
- Masyarakat	Potensi penurunan kualitas/kuantitas program <i>flagship</i> yang bersifat populis	Penurunan daya beli masyarakat	Potensi <i>moral hazard</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi <i>moral hazard</i></li> <li>Kebijakan iuran Tapera</li> </ul>
<i>Cost/Benefit</i>	Tambahan defisit anggaran Rp79 triliun; diperlukan alternatif pendapatan negara	Kenaikan target penerimaan sebesar Rp125 triliun	Anggaran Rp71 triliun	Rencana Anggaran Rp53,6 triliun

Merujuk pada skenario di atas, penerimaan negara dari peningkatan PPN 12% berpotensi untuk mendanai program unggulan Pemerintahan Prabowo Subianto yaitu MBG dan program 3 juta rumah pada tahun 2025, namun berpotensi mengganggu daya beli masyarakat. Peningkatan **PPN menjadi 12%** diproyeksikan akan berkontribusi terhadap **peningkatan sebesar Rp125 triliun**. Di sisi lain program utama pemerintah saat ini yaitu **Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah** secara bersama **membutuhkan anggaran Rp124,6 triliun**. Sementara itu, PPN tetap 11% akan memberikan tugas tambahan bagi pemerintah untuk mencari alternatif pendapatan utamanya untuk membiayai berbagai program dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Meskipun demikian, **skenario PPN tetap 11% dianggap merupakan opsi lebih baik** karena dalam kondisi ini konsumsi masyarakat yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap target pertumbuhan ekonomi ke depan.



# TERIMA KASIH